



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN, KELAS JABATAN,
DAN NILAI JABATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, serta untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/486/M.SM.04.00/2021 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Batu tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

- Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 8/E);
20. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 107/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 95 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 95/D);
 21. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 119/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 112/D);
 22. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 93/D);
 23. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 94/D);
 24. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 96/D);
 25. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 97/D);
 26. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 98 Tahun 2021

- tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 98/D);
27. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 99/D);
 28. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 100/D);
 29. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 101/D);
 30. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 102/D);
 31. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 103/D);
 32. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 104/D);
 33. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 105/D);
 34. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 106/D);
 35. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 107/D);
 36. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 108 Tahun 2021

- tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 108/D);
37. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 109/D);
 38. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 110/D);
 39. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 111/D);
 40. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 113/D);
 41. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 114/D);
 42. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 115/D);
 43. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 116/D);
 44. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 117/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG NOMENKLATUR JABATAN, KELAS JABATAN, DAN NILAI JABATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam satuan organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
11. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan

- tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan data Jabatan untuk dianalisis, disusun, dan disajikan menjadi informasi Jabatan dengan menggunakan metode tertentu.
 14. Analisis Beban Kerja adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui jumlah pegawai yang diperlukan berdasarkan sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam suatu satuan waktu tertentu.
 15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
 16. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan, yang menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
 17. *Factor Evaluation System* yang selanjutnya disingkat FES adalah metode sistem evaluasi faktor yang digunakan untuk menentukan bobot jabatan yang terdiri dari kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan kriteria dalam informasi faktor jabatan.
 18. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan dan sumber lain misalnya hasil wawancara.
 19. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana dalam rangkaian susunan satuan organisasi yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan pegawai.
 20. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin pada informasi faktor jabatan struktural, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
 21. Nomenklatur Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa

- sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan dalam suatu organisasi.
22. Persediaan Pegawai atau *Bezetting* adalah jumlah pegawai yang dimiliki saat ini pada suatu jabatan di dalam unit organisasi.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk memberikan keseragaman nomenklatur jabatan sesuai dengan tugas Jabatan berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
- b. menetapkan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan bagi ASN di lingkungan pemerintah Daerah secara adil, objektif, dan transparan berdasarkan Evaluasi Jabatan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, serta pemberhentian ASN;
- b. memberikan kejelasan tugas dan fungsi bagi ASN dan calon ASN sesuai dengan latar belakang pendidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan standar dalam penyusunan peringkat jabatan.

BAB II NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan bagi ASN pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. JPT;
- b. JA;
- c. Jabatan Pengawas;
- d. JF; dan
- e. Jabatan Pelaksana.

Pasal 5

Nomenklatur JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a, JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berdasarkan Jabatan Struktural dengan Nomenklatur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Batu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Nomenklatur JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah Nomenklatur Jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JF.
- (2) Nomenklatur JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan sesuai dengan jenjang keahlian dan keterampilan.
- (3) Nomenklatur JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bagi Pejabat Administrasi hasil penyederhanaan birokrasi berlaku mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JF.

Pasal 7

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Nomenklatur Jabatan bagi ASN pada SKPD disusun berdasarkan proses Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan format sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nomenklatur Jabatan bagi ASN pada SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN

Pasal 10

- (1) Penentuan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan bagi ASN pada SKPD berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan.
- (2) Penyusunan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode FES sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, dan Informasi Faktor Jabatan.
- (4) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar dalam menentukan tambahan penghasilan Pegawai ASN.
- (5) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Dokumen Evaluasi Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Kriteria dalam Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi:
 - a. faktor Evaluasi Jabatan Manajerial/Struktural; dan
 - b. faktor Evaluasi Jabatan Nonmanajerial/Nonstruktural.
- (2) Faktor Evaluasi Jabatan Manajerial/Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 1. ruang lingkup dan dampak;
 2. pengaturan organisasi;
 3. wewenang;
 4. sifat hubungan;
 5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 6. kondisi lain.
- (3) Faktor Evaluasi Jabatan Nonmanajerial/Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 1. pengetahuan dan keahlian;
 2. pengawasan;
 3. pedoman kerja;
 4. kompleksitas;
 5. ruang lingkup dan dampak;
 6. hubungan interpersonal;
 7. tujuan hubungan;
 8. tuntutan fisik; dan
 9. lingkungan kerja.

Pasal 12

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), digunakan sebagai dasar:

- a. penetapan besaran tambahan penghasilan pegawai;
- b. perencanaan pengembangan pegawai;
- c. penyempurnaan pendidikan dan pelatihan;
- d. seleksi, rotasi, mutasi, dan promosi pegawai; dan
- e. bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya aparatur.

Pasal 13

- (1) Faktor Evaluasi Jabatan Manajerial/Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dipergunakan dalam penghitungan Nilai Jabatan dan penetapan Kelas Jabatan bagi JPT, JA, dan Jabatan Pengawas.
- (2) Faktor Evaluasi Jabatan Nonmanajerial/Nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b digunakan dalam penghitungan Nilai Jabatan dan penetapan Kelas Jabatan bagi Staf Ahli Wali Kota, Jabatan Pelaksana, dan JF.
- (3) Penetapan Nilai Jabatan dan Kelas JF hasil penyederhanaan birokrasi disetarakan dengan Kelas JA yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyeteraan jabatan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur dan tugas dan fungsi unit kerja pada SKPD, dilakukan penyesuaian Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, dan Evaluasi Jabatan.
- (2) Perubahan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan dilakukan apabila terdapat perubahan Nomenklatur Jabatan, faktor Jabatan, kebutuhan Jabatan, dan Persediaan Pegawai, serta evaluasi dan ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat Jabatan Pelaksana dan JF dengan Kelas Jabatan paling sedikit kelas 7, bagi Jabatan Pengawas yang berada dalam Peta Jabatan sebagai atasan langsung Jabatan Pelaksana tersebut diberikan Kelas Jabatan 9 dan dikecualikan untuk Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Kelas jabatan bagi Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila terdapat *Bezetting* pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Pengawas di luar ketentuan ayat (2) dan ayat (3) diberikan Kelas Jabatan 8.

Pasal 16

Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 35/E); dan
2. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 36/E),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan, dan pelaksanaannya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 8 Februari 2022

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 8 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 6/D

**NOMENKLATUR JABATAN, KELAS JABATAN, DAN NILAI JABATAN
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATU**

**A. NOMENKLATUR JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI,
 JABATAN FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI, KELAS JABATAN
 DAN NILAI JABATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BATU**

NO.	NOMENKLATUR JABATAN	BOBOT JABATAN	
		KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
I.	SEKRETARIAT DAERAH		
1.	Sekretaris Daerah	15	3555
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	3030
3.	Kepala Bagian Hukum	12	2315
4.	Jf Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	9	1430
5.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	890
6.	Jf Analisis Hukum Ahli Muda	9	1430
7.	Analisis Advokasi Hukum	7	890
8.	Pengelola Bantuan Hukum	6	690
9.	Jf Penyuluh Hukum Ahli Muda	9	1430
10.	Penyusun Abstraksi Hukum	7	890
11.	Pengelola Informasi Produk Hukum	6	690
12.	Penata Laporan Keuangan	7	890
13.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
14.	Pengolah Data	6	690
15.	Kepala Bagian Pemerintahan	12	2315
16.	Jf Analisis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
17.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	7	890
18.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
19.	Jf Analisis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
20.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	7	890
21.	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6	690
22.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
23.	Jf Analisis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
24.	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7	890

25.	Penata Laporan keuangan	7	890
26.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
27.	Pengolah Data	6	690
28.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	2315
29.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
30.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
31.	Pengelola Bantuan Keagamaan	6	690
32.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
33.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
34.	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	6	690
35.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
36.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
37.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
38.	Penata Laporan Keuangan	7	890
39.	Pengolah Data	6	690
40.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
41.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	3030
42.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	12	2315
43.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
44.	Penelaah Perkembangan BUMD	7	890
45.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
46.	Penata Laporan Keuangan	7	890
47.	Pengelola Program dan Laporan	6	690
48.	Pengolah Data	6	690
49.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
50.	Analisis Perekonomian	7	890
51.	Penyusun Program Pengawasan Perekonomian	7	890
52.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690
53.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
54.	Analisis Pengelolaan Dana bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam	7	890
55.	Penelaah Data Sumber Daya Alam	7	890
56.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690
57.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	12	2315
58.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
59.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
60.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
61.	Penata Laporan Keuangan	7	890
62.	Pengelola Program dan Laporan	6	690
63.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
64.	Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	7	890
65.	Pengelola Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	6	690
66.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
67.	Penyusun Laporan Kebijakan	7	890
68.	Pengolah Data	6	690

69.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	2315
70.	Jf Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	9	1430
71.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
72.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
73.	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6	690
74.	Jf Pranata Komputer Ahli Muda	9	1430
75.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
76.	Penata Laporan Keuangan	7	890
77.	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6	690
78.	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	690
79.	Jf Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	9	1430
80.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	890
81.	Analisis Pengembangan Kompetensi	7	890
82.	Pengolah Data	6	690
83.	Asisten Administrasi Umum	14	3030
84.	Kepala Bagian Umum	12	2315
85.	Jf Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9	1430
86.	Pengelola Surat	6	690
87.	Sekretaris	6	690
88.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
89.	Pengelola Kepegawaian	6	690
90.	Pengemudi	3	340
91.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
92.	Pranata Kearsipan	6	690
93.	Jf Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	9	1430
94.	Penata Laporan Keuangan	7	890
95.	Pemeriksa Transaksi Keuangan	7	890
96.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
97.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
98.	Pengadministrasi Keuangan	5	490
99.	Jf Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Ahli Muda	9	1430
100.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
101.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6	690
102.	Teknisi Peralatan dan Mesin	5	490
103.	Pranata Barang dan Jasa	6	690
104.	Pengelola Kebutuhan Logistik	6	690
105.	Kepala Bagian Organisasi	12	2315
106.	Jf Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9	1430
107.	Analisis Organisasi	7	890
108.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690

109.	Jf Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9	1430
110.	Analisis Tata Laksana	7	890
111.	Analisis Pelayanan Publik	7	890
112.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
113.	Jf Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9	1430
114.	Analisis Kinerja	7	890
115.	Penata Laporan Keuangan	7	890
116.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
117.	Pengolah Data	6	690
118.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	2315
119.	Kepala Sub Bagian Protokol	9	1430
120.	Penata Acara	7	890
121.	Petugas Protokol	6	690
122.	Pranata Acara	6	690
123.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
124.	Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1430
125.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
126.	Pengolah Data	6	690
127.	Sekretaris	6	690
128.	Ajudan	6	690
129.	Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1430
130.	Pengelola Dokumentasi	6	690
131.	Penata Laporan Keuangan	7	890
132.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
133.	Pengolah Data	6	690
134.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	13	2715
135.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;	13	2715
136.	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Kemasyarakatan	13	2715
II.	SEKRETARIAT DPRD		
137.	Sekretaris DPRD	14	2865
138.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	11	2090
139.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9	1430
140.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
141.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
142.	Penata Laporan Keuangan	7	890
143.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
144.	Verifikator Keuangan	6	690
145.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690

146.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	9	1430
147.	Pengelola Kepegawaian	6	690
148.	Pengelola Surat	6	690
149.	Penyusun Naskah	7	890
150.	Jf Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	9	1430
151.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	890
152.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
153.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	490
154.	Pengemudi	3	340
155.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	11	2090
156.	Jf Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	9	1430
157.	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	7	890
158.	Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	6	690
159.	Jf Perisalah Legislatif Ahli Muda	9	1430
160.	Penyusun Risalah	7	890
161.	Notulis Rapat	6	690
162.	Pengelola Persidangan	6	690
163.	Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1430
164.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
165.	Pengelola Layanan Kehumasan	6	690
166.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
167.	Ajudan	6	690
168.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	11	2090
169.	Jf Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1430
170.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
171.	Pengolah Data Penganggaran	6	690
172.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
173.	Penyusun Rencana Pengawasan	7	890
174.	Pengelola Data	6	690
III.	INSPEKTORAT		
175.	Inspektur	14	3030
176.	Sekretaris Inspektorat	12	2140
177.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
178.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
179.	Pengelola Data Temuan Pengawasan	6	690
180.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian	9	1430
181.	Penata Laporan Keuangan	7	890

182.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
183.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
184.	Pengelola Kepegawaian	6	690
185.	Pengelola Surat	6	690
186.	Pengemudi	3	340
187.	Inspektur Pembantu Wilayah I	11	1990
188.	Inspektur Pembantu Wilayah II	11	1990
189.	Inspektur Pembantu Wilayah III	11	1990
190.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	11	1990
IV.	DINAS PENDIDIKAN		
191.	Kepala Dinas Dinas Pendidikan	14	2865
192.	Sekretaris Dinas Pendidikan	12	2115
193.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
194.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
195.	Pengolah Data	6	690
196.	Jf Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1430
197.	Penata Laporan Keuangan	7	890
198.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
199.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
200.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
201.	Verifikator Keuangan	6	690
202.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
203.	Pengelola Kepegawaian	6	690
204.	Pengelola Surat	6	690
205.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
206.	Pengemudi	3	340
207.	Pengelola Data	6	690
208.	Pramu Kebersihan	1	190
209.	Petugas Keamanan	3	340
210.	Pengadministrasi Umum	5	490
211.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	11	2045
212.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar	9	1430
213.	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	890
214.	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	6	690
215.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690
216.	Jf Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda	9	1430
217.	Penyusun Program Fasilitasi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan	7	890

218.	Pengelola Kurikulum	6	690
219.	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	6	690
220.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
221.	Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	9	1430
222.	Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	890
223.	Penyusun Program Sertifikasi Pendidik	7	890
224.	Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	690
225.	Pengadministrasian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	490
226.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	11	2045
227.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama	9	1430
228.	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	890
229.	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	6	690
230.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690
231.	Jf Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda	9	1430
232.	Penyusun Program Fasilitasi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan	7	890
233.	Pengelola Kurikulum	6	690
234.	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	6	690
235.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
236.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	9	1430
237.	Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	890
238.	Penyusun Program Sertifikasi Pendidik	7	890
239.	Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	690
240.	Pengadministrasian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	490
241.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	11	2045
242.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	9	1430
243.	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	6	690
244.	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	890
245.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690

246.	Jf Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda	9	1430
247.	Penyusun Program Fasilitasi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan	7	890
248.	Pengelola Kurikulum	6	690
249.	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	6	690
250.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
251.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	9	1430
252.	Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	890
253.	Penyusun Program Sertifikasi Pendidik	7	890
254.	Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	690
255.	Pengadministrasian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	490
256.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	11	2045
257.	Jf Analisis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
258.	Penyusun Bahan Kerjasama Pelatihan	7	890
259.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
260.	Pengelola Bahan Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	6	690
261.	Jf Analisis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
262.	Penyusun Bahan Kerjasama Pelatihan	7	890
263.	Pengelola Bahan Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	6	690
264.	Pengelola Sarana Olahraga	6	690
265.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	490
266.	Jf Analisis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
267.	Penyusun Bahan Kerjasama Pelatihan	7	890
268.	Pengawas Olah Raga	5	490
269.	Pengelola Bahan Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	6	690
IV.a	UPT Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak		
270.	Pengolah Data	6	690
271.	Pramu Kebersihan	1	190
272.	Petugas Keamanan	3	340
IV.b	UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
273.	Pengolah Data	6	690
274.	Pramu Kebersihan	1	190
275.	Petugas Keamanan	3	340
IV.b	UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
276.	Pengolah Data	6	690
277.	Pramu Kebersihan	1	190
278.	Petugas Keamanan	3	340

V.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
279.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	14	2865
280.	Sekretaris Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	12	2115
281.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
282.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
283.	Pengelola Program dan Laporan	6	690
284.	Jf Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1430
285.	Penata Laporan Keuangan	7	890
286.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
287.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
288.	Verifikator Keuangan	6	690
289.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
290.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
291.	Pengelola Kepegawaian	6	690
292.	Pengelola Surat	6	690
293.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
294.	Pengemudi	3	340
295.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	2045
296.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
297.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
298.	Penyuluh Pemberdayaan Perempuan dan Anak	7	890
299.	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	6	690
300.	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	690
301.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
302.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
303.	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	7	890
304.	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	690
305.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
306.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
307.	Pengawas Perempuan dan Anak	7	890
308.	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	690
309.	Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	5	490

310.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	2045
311.	Jf Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	1430
312.	Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	890
313.	Pengawas Kependudukan	7	890
314.	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6	690
315.	Pengolah Data	6	690
316.	Jf Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	1430
317.	Penyusun Bahan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	7	890
318.	Pengawas Pelayanan Keluarga Berencana	7	890
319.	Pengelola Layanan Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia	6	690
320.	Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana	6	690
321.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
322.	Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana	7	890
323.	Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga	7	890
324.	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	6	690
325.	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga	6	690
326.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	11	2045
327.	Jf Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	1430
328.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
329.	Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan	7	890
330.	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	6	690
331.	Jf Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	1430
332.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
333.	Pengelola Data	6	690
334.	Pengolah Data	6	690
335.	Jf Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	1430
336.	Penyusun Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat	7	890
337.	Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	6	690
338.	Pengolah Data Kelembagaan	6	690
339.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	11	2045
340.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
341.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
342.	Pengolah Data	6	690
343.	Pengelola data	6	690

344.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
345.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
346.	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	6	690
347.	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	6	690
348.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
349.	Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi	7	890
350.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	690
351.	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	690
VI.	DINAS PARIWISATA		
352.	Kepala Dinas Pariwisata	14	2865
353.	Sekretaris Dinas Pariwisata	12	2115
354.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
355.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
356.	Pengolah Data	6	690
357.	Jf Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1430
358.	Penata Laporan Keuangan	7	890
359.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
360.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
361.	Verifikator Keuangan	6	690
362.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
363.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
364.	Pengelola Surat	6	690
365.	Pengelola Kepegawaian	6	690
366.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
367.	Pengemudi	3	340
368.	Pramu Kebersihan	1	190
369.	Pengolah Data Pelayanan	6	690
370.	Sekretaris	6	690
371.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	11	2045
372.	Jf Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9	1430
373.	Pengawas Kepariwisata	7	890
374.	Pengelola usaha kepariwisataan	6	690
375.	Pengadministrasi izin usaha Pariwisata	5	490
376.	Jf Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9	1430
377.	Pengawas Kepariwisata	7	890
378.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
379.	Pengolah Data	6	690
380.	Jf Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9	1430
381.	Pengawas Kepariwisata	7	890
382.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
383.	Pengolah Data	6	690
384.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	11	2045

385.	Jf Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9	1430
386.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
387.	Pengelola Situs atau Web	6	690
388.	Pengelola Informasi Kepariwisataaan	6	690
389.	Jf Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9	1430
390.	Analisis Pariwisata	7	890
391.	Pengelola Teknologi Informasi	6	690
392.	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	6	690
393.	Jf Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9	1430
394.	Penyusun Rencana Promosi	7	890
395.	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	6	690
396.	Pengelola Data Pameran dan Kemitraan	6	690
397.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Manusia Pariwisata	11	2045
398.	Jf Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9	1430
399.	Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi	7	890
400.	Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	6	690
401.	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6	690
402.	Jf Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9	1430
403.	Pengelola Penataan Sarana Dan Prasarana	6	690
404.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana	7	890
405.	Pengolah Data	6	690
406.	Jf Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	9	1430
407.	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi SDM Kebudayaan	7	890
408.	Pengelola Data Program Peningkatan Kompetensi SDM Kebudayaan	6	690
409.	Pengelola Data Sertifikasi SDM Kebudayaan	6	690
410.	Kepala Bidang Kebudayaan	11	2045
411.	Jf Pamong Budaya Ahli Muda	9	1430
412.	Penyusun Program Penulisan Sejarah dan Nilai Budaya	7	890
413.	Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum	6	690
414.	Penyusun Informasi Arkeologi	7	890
415.	Jf Pamong Budaya Ahli Muda	9	1430
416.	Pengelola Data Kekayaan Budaya	6	690
417.	Penyusun Program Pembinaan Ekspresi Budaya Tradisional	7	890
418.	Pengelola Data Lingkungan Budaya	6	690

419.	Jf Pamong Budaya Ahli Muda	9	1430
420.	Penyusun Dokumentasi Kesenian dan Perfilman	7	890
421.	Pengelola Adat dan Kesenian	6	690
422.	Pengelola Data	6	690
VII.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
423.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	14	2865
424.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	12	2115
425.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
426.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
427.	Pengolah Data	6	690
428.	Jf Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1430
429.	Penata Laporan Keuangan	7	890
430.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
431.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
432.	Verifikator Keuangan	6	690
433.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
434.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
435.	Pengelola Surat	6	690
436.	Pengelola Kepegawaian	6	690
437.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
438.	Pengemudi	3	340
439.	Pramu Bakti	1	190
440.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	11	2045
441.	Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1430
442.	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7	890
443.	Pengolah Data	6	690
444.	Pengelola Dokumentasi	6	690
445.	Pengolah Konten Media Sosial	6	690
446.	Pengelola Pengaduan Publik	6	690
447.	Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1430
448.	Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama	7	890
449.	Pengelola Media Cetak	6	690
450.	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	6	690
451.	Pengadministrasi Umum	5	490
452.	Jf Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1430
453.	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6	690
454.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
455.	Pengelola Data	6	690
456.	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	5	490

457.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian	11	2045
458.	Jf Pranata Komputer Ahli Muda	9	1430
459.	Pengelola Situs atau Web	6	690
460.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
461.	Pengelola Teknologi Informasi	6	690
462.	Jf Pranata Komputer Ahli Muda	9	1430
463.	Pengelola Data Base	6	690
464.	Pengendali Teknologi Informasi	7	890
465.	Analisis Penerapan Aplikasi dan Konten	7	890
466.	Kepala Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi, Persandian, dan Keamanan Informasi	9	1430
467.	Teknisi Jaringan Instalasi	5	490
468.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7	890
469.	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	690
470.	Pengelola Data Persandian	6	690
471.	Analisis Persandian	7	890
472.	Kepala Bidang Data dan Statistik	11	2045
473.	Jf Statistisi Ahli Muda	9	1430
474.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
475.	Pengelola Data Statistik	6	690
476.	Jf Statistisi Ahli Muda	9	1430
477.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
478.	Pengelola Data Statistik	6	690
479.	Jf Statistisi Ahli Muda	9	1430
480.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
481.	Pengelola Data Statistik	6	690
VIII.	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		
482.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	14	2865
483.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	12	2115
484.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
485.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
486.	Pengolah Data	6	690
487.	Jf Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1430
488.	Penata Laporan Keuangan	7	890
489.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
490.	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	6	690
491.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690

492.	Verifikator Keuangan	6	690
493.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
494.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
495.	Pengelola Surat	6	690
496.	Pengelola Kepegawaian	6	690
497.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
498.	Pengemudi	3	340
499.	Pengadministrasi Umum	5	490
500.	Jf Analis Kebijakan Ahli Madya	11	2045
501.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
502.	Analisis Penanaman Modal	7	890
503.	Penyusun Rencana Permodalan	7	890
504.	Pengelola Pengembangan Investasi	6	690
505.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
506.	Analisis Kelembagaan Usaha	7	890
507.	Pengelola Program Dunia Usaha	6	690
508.	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	6	690
509.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
510.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
511.	Pengelola Data Pengembangan Investasi	6	690
512.	Pengelola SIM Penanaman Modal dan perizinan Terpadu	6	690
513.	Jf Analis Kebijakan Ahli Madya	11	2045
514.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
515.	Penyusun Rencana Promosi	7	890
516.	Fasilitator Promosi	7	890
517.	Pengelola Data	6	690
518.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
519.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
520.	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	690
521.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
522.	Jf Pranata Komputer Ahli Muda	9	1430
523.	Pengawas Penanaman Modal	7	890
524.	Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi	6	690
525.	Pengelola Data	6	690
526.	Jf Analis Kebijakan Ahli Madya	11	2045
527.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
528.	Analisis Dokumen Perizinan	7	890
529.	Pengelola Dokumen Perizinan	6	690
530.	Pengelola Perizinan	6	690
531.	Pengadministrasi Perijinan	5	490

532.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
533.	Analisis Dokumen Perizinan	7	890
534.	Pengelola Dokumen Perizinan	6	690
535.	Pengelola Perizinan	6	690
536.	Pengadministrasian Perijinan	5	490
537.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
538.	Penyusun Bahan Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan	7	890
539.	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6	690
540.	Pengolah Data Pelayanan	6	690
541.	Pengolah Data	6	690
542.	Kepala Bidang Tenaga Kerja	11	2045
543.	Jf Pengantar Kerja Ahli Muda	9	1430
544.	Pengelola Data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	6	690
545.	Penyusun Bahan Kerjasama Pelatihan	7	890
546.	Pengelola Data	6	690
547.	Jf Pengantar Kerja Ahli Muda	9	1430
548.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
549.	Pengolah Data Pelayanan	6	690
550.	Penyuluh Tenaga Kerja	7	890
551.	Pengelola Data	6	690
552.	Jf Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	9	1430
553.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
554.	Pengelola Data	6	690
IX.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
555.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	2865
556.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	2115
557.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
558.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
559.	Pengolah Data	6	690
560.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian	9	1430
561.	Penata Laporan Keuangan	7	890
562.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
563.	Pengelola Kepegawaian	6	690
564.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
565.	Verifikator Keuangan	6	690
566.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
567.	Pengemudi	3	340
568.	Kepala Bidang Perpustakaan	11	2045
569.	Jf Pustakawan Ahli Muda	9	1430
570.	Pengelola Bahan Pustaka	6	690
571.	Pengadministrasian Perpustakaan	5	490
572.	Pengawas Perpustakaan	7	890

573.	Jf Pustakawan Ahli Muda	9	3430
574.	Pengelola Bahan Pustaka	6	690
575.	Pengolah Data	6	690
576.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
577.	Jf Pustakawan Ahli Muda	9	1430
578.	Pengelola Koleksi	6	690
579.	Pengolah Data	6	690
580.	Penyuluh Perpustakaan	7	890
581.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	11	2045
582.	Jf Arsiparis Ahli Muda	9	1430
583.	Penyuluh Kearsipan	7	890
584.	Pranata Kearsipan	6	690
585.	Pengelola Data	6	690
586.	Jf Arsiparis Ahli Muda	9	1430
587.	Penyuluh Kearsipan	7	890
588.	Pranata Kearsipan	6	690
589.	Pengelola Data	6	690
590.	Jf Arsiparis Ahli Muda	9	1430
591.	Penyuluh Kearsipan	7	890
592.	Pranata Kearsipan	6	690
593.	Pranata Restorasi Arsip	6	690
594.	Pranata Reproduksi Arsip	6	690
595.	Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Arsip	11	2045
596.	Jf Arsiparis Ahli Muda	9	1430
597.	Penyuluh Kearsipan	7	890
598.	Pranata Kearsipan	6	690
599.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690
600.	Jf Arsiparis Ahli Muda	9	1430
601.	Penyuluh Kearsipan	7	890
602.	Pranata Kearsipan	6	690
603.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690
604.	Jf Pranata Komputer Ahli Muda	9	1430
605.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
606.	Pranata kearsipan	6	690
607.	Pengelola Data	6	690
X.	DINAS KESEHATAN		
608.	Kepala Dinas KESEHATAN	14	2865
609.	Sekretaris Dinas KESEHATAN	12	2115
610.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
611.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
612.	Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi	6	690
613.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690

614.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian	9	1430
615.	Penata Laporan Keuangan	7	890
616.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
617.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
618.	Verifikator Keuangan	6	690
619.	Pengelola Kepegawaian	6	690
620.	Pengelola Surat	6	690
621.	Pengelola Program Kegiatan	6	690
622.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
623.	Pengemudi	3	340
624.	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	6	690
625.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	2045
626.	Jf Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	1430
627.	Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan	6	690
628.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
629.	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	890
630.	Jf Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	1430
631.	Pengelola Program Gizi	6	690
632.	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	6	690
633.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
634.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
635.	Jf Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	1430
636.	Pemeriksa Sanitasi	7	890
637.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
638.	Pengelola Data	6	690
639.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690
640.	Kepala Bidang Pelayanan, Pembiayaan, dan Sumber Daya Kesehatan	11	2045
641.	Jf Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	1430
642.	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	690
643.	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	6	690
644.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
645.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
646.	Jf Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	1430
647.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
648.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
649.	Pengelola Dokumen Perizinan	6	690
650.	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	6	690
651.	Jf Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	1430
652.	Pengelola Kefarmasian	6	690

653.	Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan	6	690
654.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
655.	Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan	7	890
656.	Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Penanganan Bencana	11	2045
657.	Jf Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	1430
658.	Pengelola Program Imunisasi	6	690
659.	Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan	7	890
660.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
661.	Jf Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	1430
662.	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	6	690
663.	Pengelola Penyakit Tidak Menular	6	690
664.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
665.	Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	6	690
666.	Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan	7	890
667.	Jf Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	1430
668.	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	690
669.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
670.	Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan	7	890
X.a	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat	8	1295
671.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
672.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
673.	Pengadministrasi Umum	5	490
674.	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	490
675.	Pengelola Data	6	690
676.	Pengemudi Ambulan	4	440
677.	Petugas Keamanan	3	340
XI.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
678.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	2865
679.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	2115
680.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
681.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
682.	Pengelola Program dan Laporan	6	690
683.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian	9	1430
684.	Penata Laporan Keuangan	7	890

685.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
686.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
687.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
688.	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	6	690
689.	Verifikator Keuangan	6	690
690.	Pengelola Keuangan	6	690
691.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
692.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
693.	Pengelola Kepegawaian	6	690
694.	Pengelola Surat	6	690
695.	Pengemudi	3	340
696.	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi	11	2045
697.	Jf Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1430
698.	Analisis Sumber Daya Air	7	890
699.	Penelaah Data Statistik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	7	890
700.	Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air	7	890
701.	Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air	6	690
702.	Pengelola Data	6	690
703.	Jf Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1430
704.	Analisis Pengembangan Sarana Prasarana	7	890
705.	Pemeriksa Irigasi	7	890
706.	Pengelola Irigasi	6	690
707.	Pengelola Data	6	690
708.	Jf Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1430
709.	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	7	890
710.	Penjaga Pintu Air	3	340
711.	Pengelola Pemeliharaan Sarana Pengairan	6	690
712.	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6	690
713.	Pengelola Data	6	690
714.	Kepala Bidang Bina Marga	11	2045
715.	Jf Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	1430
716.	Analisis Jalan dan Jembatan	7	890
717.	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	890
718.	Pengolah Data Survei, Pengukuran, dan Pemetaan	6	690
719.	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	6	690
720.	Pengelola Kelengkapan Jalan	6	690

721.	Jf Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	1430
722.	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	7	890
723.	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	890
724.	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	690
725.	Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	6	690
726.	Pemelihara Peralatan	5	490
727.	Operator Alat Berat	5	490
728.	Pengelola data	6	690
729.	Jf Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	1430
730.	Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik	7	890
731.	Pemelihara Bangunan	5	490
732.	Pengelola Data	6	690
733.	Kepala Bidang Tata Ruang	11	2045
734.	Jf Penata Ruang Ahli Muda	9	1430
735.	Analisis Tata Ruang	7	890
736.	Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi	7	890
737.	Pengelola Tata Ruang	6	690
738.	Pengolah Data	6	690
739.	Pengolah Data Survei, Pengukuran, dan Pemetaan	6	690
740.	Jf Penata Ruang Ahli Muda	9	1430
741.	Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang	7	890
742.	Pengawas Tata Ruang	7	890
743.	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6	690
744.	Jf Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	1430
745.	Pengawas Jaringan Utilitas	7	890
746.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
747.	Pemelihara Penerangan Jalan	5	490
748.	Pengelola Penerangan Jalan	6	690
749.	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	490
XII.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
750.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	14	2865
751.	Sekretaris Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	12	2115
752.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
753.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
754.	Pengolah Data	6	690
755.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian	9	1430
756.	Pengelola Kepegawaian	6	690
757.	Pengelola Surat	6	690

758.	Penata Laporan Keuangan	7	890
759.	Verifikator Keuangan	6	690
760.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
761.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
762.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
763.	Pramu Kebersihan	1	190
764.	Pengemudi	3	340
765.	Kepala Bidang Perumahan	11	2045
766.	Jf Teknik tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	1430
767.	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	7	890
768.	Analisis Perumahan	7	890
769.	Pengolah Data Survei, Pengukuran dan Pemetaan	6	690
770.	Pengelola Data	6	690
771.	Jf Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	1430
772.	Pengawas Fisik Pemukiman	7	890
773.	Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik	7	890
774.	Pengolah Data Survei, Pengukuran dan Pemetaan	6	690
775.	Jf Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	1430
776.	Pengawas Pemanfaatan Tanah	7	890
777.	Penyusun Pembinaan Keagrariaan	7	890
778.	Pengelola Data Pengendalian Pertanahan	6	690
779.	Pengolah Data Survei, Pengukuran dan Pemetaan	6	690
780.	Pengelola Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum	6	690
781.	Kepala Bidang Cipta Karya	11	2045
782.	Jf Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	1430
783.	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	7	890
784.	Penelaah Mutu Konstruksi	7	890
785.	Pengelola Data	6	690
786.	Pengolah Data Survei, Pengukuran dan Pemetaan	6	690
787.	Jf Pembina jasa Konstruksi Ahli Muda	9	1430
788.	Pengolah Data Survei, Pengukuran dan Pemetaan	6	690
789.	Penelaah Bangunan Gedung dan Pemukiman	7	890
790.	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	7	890
791.	Pengelola Data	6	690
792.	Jf Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	1430
793.	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	7	890
794.	Pengolah Data Survei, Pengukuran dan Pemetaan	6	690

795.	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman	7	890
796.	Kepala Bidang Bina Konstruksi	11	2045
797.	Jf Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	1430
798.	Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama	7	890
799.	Pengelola Data	6	690
800.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
801.	Jf Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	1430
802.	Penelaah Mutu Konstruksi	7	890
803.	Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik	7	890
804.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
805.	Jf Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	1430
806.	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat	7	890
807.	Pengelola Jasa Konstruksi	6	690
808.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
809.	Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik	8	1295
810.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
811.	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	490
812.	Pengolah Data Survei, Pengukuran dan Pemetaan	6	690
813.	Pengemudi	3	340
814.	Pengelola Pengendalian dan Operasional	6	690
815.	Petugas Keamanan	3	340
816.	Pengolah Data	6	690
XIII.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
817.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	2865
818.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	12	2115
819.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
820.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
821.	Pengelola Program dan Laporan	6	690
822.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian	9	1430
823.	Penata Laporan Keuangan	7	890
824.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
825.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
826.	Verifikator Keuangan	6	690
827.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
828.	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	6	690
829.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
830.	Pengelola Kepegawaian	6	690
831.	Pengelola Surat	6	690
832.	Pengemudi	3	340

833.	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan	11	2045
834.	Jf Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	1430
835.	Analisis Lingkungan Hidup	7	890
836.	Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam	6	690
837.	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	6	690
838.	Jf Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	1430
839.	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	7	890
840.	Analisis Lingkungan Hidup	7	890
841.	Pengelola Data	6	690
842.	Jf Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	1430
843.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
844.	Penyuluh Lingkungan Hidup	7	890
845.	Pengelola Data	6	690
846.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan Lingkungan, dan Pertamanan	11	2045
847.	Jf Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	1430
848.	Analisis Lingkungan Hidup	7	890
849.	Penelaah Dampak Lingkungan	7	890
850.	Pengelola Informasi Lingkungan	6	690
851.	Jf Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	1430
852.	Analisis Lingkungan Hidup	7	890
853.	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	6	690
854.	Pengelola Data	6	690
855.	Jf Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	1430
856.	Pengawas Tata Pertamanan	7	890
857.	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan	7	890
858.	Pengolah Data	6	690
859.	Pramu Taman	1	190
860.	Pengemudi	3	340
861.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	11	2045
862.	Jf Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	1430
863.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	7	890
864.	Pengelola Penataan Sampah	6	690
865.	Pengelola Data	6	690
866.	Juru Pungut Kebersihan	3	340
867.	Pramu Kebersihan	1	190
868.	Pengemudi	3	340
869.	Jf Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	1430
870.	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	7	890

871.	Pengolah Data	6	690
872.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	490
873.	Operator Alat Berat	5	490
874.	Jf Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	1430
875.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
876.	Penyuluh Lingkungan Hidup	7	890
877.	Pengelola Limbah	6	690
878.	Pengolah Data	6	690
XIV.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
879.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	14	2865
880.	Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12	2115
881.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	1430
882.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
883.	Pengolah Data	6	690
884.	Penata Laporan Keuangan	7	890
885.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
886.	Verifikator Keuangan	6	690
887.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
888.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
889.	Pengelola Kepegawaian	6	690
890.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
891.	Pengelola Surat	6	690
892.	Pengemudi	3	340
893.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11	2045
894.	Jf Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	1430
895.	Pengolah Data Pelayanan	6	690
896.	Pengelola Dokumentasi	6	690
897.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
898.	Jf Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	1430
899.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
900.	Pengelola Mutasi Penduduk	6	690
901.	Pengolah Data Pelayanan	6	690
902.	Jf Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	1430
903.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
904.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690

905.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	2045
906.	Jf Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	1430
907.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
908.	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6	690
909.	Pengolah Data Pelayanan	6	690
910.	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	5	490
911.	Jf Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	1430
912.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
913.	Pengolah Data Pelayanan	6	690
914.	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6	690
915.	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan, dan Pengesahan Akta	5	490
916.	Jf Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	1430
917.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
918.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690
919.	Pengolah Data Pelayanan	6	690
920.	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6	690
921.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	11	2045
922.	Jf Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	9	1430
923.	Penyusun Analisis Dampak Kependudukan	7	890
924.	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	6	690
925.	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	690
926.	Jf Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	9	1430
927.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
928.	Pengelola Database	6	690
929.	Jf Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	9	1430
930.	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan	7	890
931.	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6	690
XV.	DINAS PERHUBUNGAN		
932.	Kepala Dinas Perhubungan	14	2865
933.	Sekretaris Dinas Perhubungan	12	2115
934.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
935.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
936.	Pengolah data	6	690

937.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian	9	1430
938.	Penata Laporan Keuangan	7	890
939.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
940.	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	6	690
941.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
942.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
943.	Pengelola Kepegawaian	6	690
944.	Pengelola Surat	6	690
945.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
946.	Verifikator Keuangan	6	690
947.	Pengemudi	3	340
948.	Kepala Bidang Lalu Lintas	11	2045
949.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	9	1430
950.	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	6	690
951.	Pengawas Lalu Lintas Darat	7	890
952.	Teknisi Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan	5	490
953.	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi	9	1430
954.	Pengawas Lalu Lintas Darat	7	890
955.	Pengatur Lalu Lintas Jalan	6	690
956.	Pengolah Data	6	690
957.	Pranata Tilang	6	690
958.	Kepala Bidang Angkutan	11	2045
959.	Kepala Seksi Tata Kelola Angkutan Jalan	9	1430
960.	Pengawas dan Pembina Angkutan	7	890
961.	Pengelola Angkutan Kendaraan	6	690
962.	Pengelola Data	6	690
963.	Kepala Seksi Pembinaan Keselamatan Angkutan Jalan	9	1430
964.	Pemeriksa Keselamatan Darat	7	890
965.	Pengolah Data	6	690
966.	Pengadministrasi LLAJ	5	490
967.	Kepala Bidang Perparkiran	11	2045
968.	Kepala Seksi Tata Kelola Perparkiran	9	1430
969.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
970.	Pengelola Retribusi Daerah	6	690
971.	Pengelola Perparkiran	6	690
972.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran	9	1430
973.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
974.	Pengelola Perparkiran	6	690
975.	Pengolah Data	6	690

976.	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	8	1295
977.	Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	5	490
978.	Pengelola Pengujian Kendaraan	6	690
XVI.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN		
979.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	14	2865
980.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	12	2115
981.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
982.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
983.	Pengolah Data	6	690
984.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian	9	1430
985.	Pengelola Surat	6	690
986.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
987.	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	6	690
988.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
989.	Pengelola Kepegawaian	6	690
990.	Penata Laporan Keuangan	7	890
991.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
992.	Verifikator Keuangan	6	690
993.	Pengemudi	3	340
994.	Kepala Bidang Koperasi	11	2045
995.	Jf Pengawas Koperasi Ahli Muda	9	1430
996.	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	6	690
997.	Penyuluh Koperasi	7	890
998.	Jf Pengawas Koperasi Ahli Muda	9	1430
999.	Analisis Koperasi	7	890
1000.	Pengolah Data	6	690
1001.	Jf Pengawas Koperasi Ahli Muda	9	1430
1002.	Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha	7	890
1003.	Pengelola Permodalan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah	6	690
1004.	Kepala Bidang Usaha Mikro dan Perindustrian	11	2045
1005.	Jf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	9	1430
1006.	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro Kecil dan Menengah	7	890
1007.	Pengolah Data	6	690

1008.	Jf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	9	1430
1009.	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri	7	890
1010.	Pengolah Data	6	690
1011.	Jf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	9	1430
1012.	Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop	6	690
1013.	Pengelola Data Pameran dan Kemitraan	6	690
1014.	Penyusun Rencana Kerja Sama Industri	7	890
1015.	Kepala Bidang Perdagangan	11	2045
1016.	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	9	1430
1017.	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	7	890
1018.	Pengelola Pasar	6	690
1019.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
1020.	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	9	1430
1021.	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	7	890
1022.	Pengelola Ekspor Hasil Usaha Industri dan Usaha Perdagangan	6	690
1023.	Jf Penera Ahli Muda	9	1430
1024.	Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen	6	690
1025.	Penyusun Bahan Proses Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan	7	890
1026.	Kepala UPT Pasar	8	1295
1027.	Juru Pungut Retribusi	3	340
1028.	Pengadministrasi Umum	5	490
1029.	Pengolah Data	6	690
1030.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
1031.	Petugas Keamanan	3	340
XVII.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
1032.	Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	14	2865
1033.	Sekretaris Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	12	2115
1034.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1035.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
1036.	Pengolah Data	6	690
1037.	Jf Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1430
1038.	Penata Laporan Keuangan	7	890
1039.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
1040.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
1041.	Verifikator Keuangan	6	690

1042.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
1043.	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	6	690
1044.	Pengadministrasi Keuangan	5	490
1045.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
1046.	Pengelola Kepegawaian	6	690
1047.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
1048.	Pengelola Surat	6	690
1049.	Pengemudi	3	340
1050.	Kepala Bidang Prasarana Pertanian	11	2045
1051.	Jf Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	9	1430
1052.	Pengawas Pengelolaan Lahan Pertanian dan Irigasi	7	890
1053.	Pengelola Lahan Pertanian	6	690
1054.	Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian	6	690
1055.	Jf Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	9	1430
1056.	Pengawas Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi	7	890
1057.	Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian	6	690
1058.	Jf Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	9	1430
1059.	Penyusun Laporan Kebijakan	7	890
1060.	Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian	6	690
1061.	Kepala Bidang Pertanian	11	2045
1062.	Jf Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	9	1430
1063.	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	7	890
1064.	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	690
1065.	Teknisi Instalasi Budidaya	5	490
1066.	Jf Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	1430
1067.	Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih atau Bibit	7	890
1068.	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	690
1069.	Pengawas Pupuk dan Pestisida	7	890
1070.	Penyusun Rencana Tata Tanam	7	890
1071.	Pengelola Data Pasca Panen	6	690
1072.	Jf Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda	9	1430
1073.	Pengelola Organisme Pengganggu Tanaman	6	690

1074.	Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan	6	690
1075.	Pengolah dampak Fenomena Alam dan Peredaran Pestisida	6	690
1076.	Penyusun Laporan Kebijakan	7	890
1077.	Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan	11	2045
1078.	Jf Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	9	1430
1079.	Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar	7	890
1080.	Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas	7	890
1081.	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya	6	690
1082.	Pengelola Data	6	690
1083.	Jf Medik Veteriner Ahli Muda	9	1430
1084.	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7	890
1085.	Pengelola Lalu Lintas Ternak dan Izin Budi Daya Ternak	6	690
1086.	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	7	890
1087.	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6	690
1088.	Jf Penyuluh Perikanan Ahli Muda	9	1430
1089.	Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan	6	690
1090.	Teknisi Perikanan Budidaya	5	490
1091.	Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya	7	890
1092.	Kepala Bidang Penyuluh Pertanian	11	2045
1093.	Jf Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9	1430
1094.	Penyusun Bahan Proses Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan	7	890
1095.	Pengelola Database Kelembagaan Petani	6	690
1096.	Jf Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9	1430
1097.	Penyusun Bahan Proses Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan	7	890
1098.	Pengolah Data	6	690
1099.	Jf Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9	1430
1100.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
1101.	Pengolah Data	6	690
1102.	Pengelola Instalasi Kebun atau Lahan Praktek dan Screen House	6	690
1103.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	11	2045
1104.	Jf Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	9	1430
1105.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890

1106.	Pengolah Data	6	690
1107.	Pengelola Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	6	690
1108.	Jf Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	9	1430
1109.	Pengawas Harga Pangan	7	890
1110.	Pengelola data	6	690
1111.	Jf Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	9	1430
1112.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
1113.	Pengelola Penganekaragaman Pangan	6	690
1114.	Pengelola Keamanan Pangan Segar Dan Pangan Jajanan Anak Sekolah	6	690
XVIII.	DINAS SOSIAL		
1115.	Kepala Dinas Sosial	14	2865
1116.	Sekretaris Dinas Sosial	12	2115
1117.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1118.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
1119.	Pengolah Data	6	690
1120.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian	9	1430
1121.	Pengelola Kepegawaian	6	690
1122.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
1123.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
1124.	Pengelola Surat	6	690
1125.	Verifikator Keuangan	6	690
1126.	Penata Laporan Keuangan	7	890
1127.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
1128.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
1129.	Pengemudi	3	340
1130.	Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	11	2045
1131.	Jf Pekerja Sosial Ahli Muda	9	1430
1132.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
1133.	Pengolah Data	6	690
1134.	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	6	690
1135.	Jf Pekerja Sosial Ahli Muda	9	1430
1136.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
1137.	Pengelola Rehabilitasi Sosial	6	690
1138.	Pengolah Data	6	690
1139.	Jf Pekerja Sosial Ahli Muda	9	1430
1140.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
1141.	Pengelola Rehabilitasi Sosial	6	690
1142.	Pengolah Data	6	690

1143.	Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial	11	2045
1144.	Jf Pekerja Sosial Ahli Muda	9	1430
1145.	Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	7	890
1146.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690
1147.	Pengelola Data	6	690
1148.	Jf Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	1430
1149.	Penyusun Pemberian bantuan Teknis	7	890
1150.	Pengolah Data	6	690
1151.	Pengelola Data	6	690
1152.	Jf Pekerja Sosial Ahli Muda	9	1430
1153.	Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis	7	890
1154.	Pengolah Data	6	690
1155.	Pengelola Data Bantuan Sosial	6	690
XIX.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1156.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14	2865
1157.	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12	2115
1158.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1159.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
1160.	Pengelola Program dan Laporan	6	690
1161.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian	9	1430
1162.	Penata Laporan Keuangan	7	890
1163.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
1164.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
1165.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
1166.	Verifikator Keuangan	6	690
1167.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1168.	Pengelola Surat	6	690
1169.	Pengelola Kepegawaian	6	690
1170.	Pengemudi	3	340
1171.	Kepala Bidang Pencegahan	11	2045
1172.	Jf Analis Kebakaran Ahli Muda	9	1430
1173.	Penyusun Rencana Inspeksi dan Verifikasi	7	890
1174.	Pengolah Data	6	690
1175.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	490
1176.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur	9	1430
1177.	Penyusun Program Perencanaan Diklat	7	890
1178.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
1179.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha	9	1430
1180.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
1181.	Penyuluh Bencana	7	890
1182.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690

1183.	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana	11	2045
1184.	Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran	9	1430
1185.	Investigator	7	890
1186.	Pranata Pemadam Kebakaran	6	690
1187.	Pengolah Data	6	690
1188.	Jf Analis Kebakaran Ahli Muda	9	1430
1189.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
1190.	Pranata Bencana	6	690
1191.	Pengelola Data	6	690
1192.	Kepala Seksi Sarana, Prasarana, Informasi dan Pengolah Data	9	1430
1193.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
1194.	Pengelola Penataan Sarana Prasarana	6	690
1195.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6	690
1196.	Pengolah Data	6	690
XX.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1197.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	2865
1198.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	2115
1199.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1200.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
1201.	Pengelola Program dan Laporan	6	690
1202.	Pengolah Data	6	690
1203.	Jf Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1430
1204.	Penata Laporan Keuangan	7	890
1205.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
1206.	Verifikator Keuangan	6	690
1207.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
1208.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
1209.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430
1210.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
1211.	Pengelola Surat	6	690
1212.	Pengelola Kepegawaian	6	690
1213.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	11	2045
1214.	Kepala Seksi Pencegahan	9	1430
1215.	Pengendali Teknis Keamanan	7	890
1216.	Penyusun Rencana Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran	7	890
1217.	Pengelola Pengendalian Masyarakat	6	690
1218.	Pengolah Data	6	690

1219.	Jf Polisi Pamong Praja Ahli Muda	9	1430
1220.	Penyidik	7	890
1221.	Penyusun Rencana Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran	7	890
1222.	Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah	6	690
1223.	Pengolah Data	6	690
1224.	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	9	1430
1225.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
1226.	Pengolah Data	6	690
1227.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	11	2045
1228.	Jf Polisi Pamong Praja Ahli Muda	9	1430
1229.	Pengendali Teknis Keamanan	7	890
1230.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	690
1231.	Pengolah Data	6	690
1232.	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	490
1233.	Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan	9	1430
1234.	Penata Teknis Pengamanan	7	890
1235.	Pengawas Teknis Keamanan	7	890
1236.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	690
1237.	Pengolah Data	6	690
1238.	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	490
1239.	Kepala Seksi Data dan Informasi	9	1430
1240.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
1241.	Pengolah Data	6	690
1242.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur	11	2045
1243.	Jf Polisi Pamong Praja Ahli Muda	9	1430
1244.	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional bagi Aparatur dan Non Aparatur	7	890
1245.	Pengelola Data	6	690
1246.	Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur	9	1430
1247.	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional bagi Aparatur dan Non Aparatur	7	890
1248.	Pengolah Data	6	690
1249.	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	9	1430
1250.	Penyuluh Keamanan Masyarakat	7	890
1251.	Pengelola Program Penyuluhan	6	690
1252.	Pengolah Data	6	690
XXI.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
1253.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	3030
1254.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	12	2140

1255.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1256.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
1257.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
1258.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
1259.	Pengelola Program dan Laporan	6	690
1260.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	9	1430
1261.	Penyusun Rancangan Perundang-undangan	7	890
1262.	Pengelola Surat	6	690
1263.	Pengelola Kepegawaian	6	690
1264.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1265.	Pengemudi	3	340
1266.	Jf Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1430
1267.	Penata Laporan Keuangan	7	890
1268.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
1269.	Verifikator Keuangan	6	690
1270.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
1271.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	11	2045
1272.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1273.	Analisis Perencanaan Strategis	7	890
1274.	Analisis Perencanaan Anggaran	7	890
1275.	Pengelola Program dan Laporan	6	690
1276.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1277.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
1278.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
1279.	Pengelola Data	6	690
1280.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1281.	Analisis Data dan Informasi	7	890
1282.	Pengelola Data	6	690
1283.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan	11	2045
1284.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1285.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
1286.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
1287.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1288.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
1289.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
1290.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1291.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
1292.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
1293.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	11	2045

1294.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1295.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
1296.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
1297.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1298.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
1299.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
1300.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1301.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
1302.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
1303.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	11	2045
1304.	Jf Peneliti Ahli Muda	9	1430
1305.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7	890
1306.	Pengelola Penelitian	6	690
1307.	Jf Peneliti Ahli Muda	9	1430
1308.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7	890
1309.	Pengelola Penelitian	6	690
1310.	Jf Peneliti Ahli Muda	9	1430
1311.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7	890
1312.	Pengelola Penelitian	6	690
XXII.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
1313.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	2865
1314.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	2115
1315.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1316.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
1317.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
1318.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian	9	1430
1319.	Penata Laporan Keuangan	7	890
1320.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
1321.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
1322.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
1323.	Verifikator Keuangan	6	690
1324.	Pengelola Kepegawaian	6	690
1325.	Pengelola Surat	6	690
1326.	Pranata Kearsipan	6	690
1327.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1328.	Pengadministrasi Umum	5	490
1329.	Kepala Bidang Data, Formasi Dan Jabatan	11	2045
1330.	Jf Pranata Komputer Ahli Muda	9	1430
1331.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890

1332.	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	7	890
1333.	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6	690
1334.	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	690
1335.	Pengelola Kepegawaian	6	690
1336.	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
1337.	Jf Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9	1430
1338.	Analisis Pengembangan Karir	7	890
1339.	Penyusun Rencana Mutasi	7	890
1340.	Penyusun Rencana Promosi	7	890
1341.	Pengelola Pengembangan Karir	6	690
1342.	Pengelola Kepegawaian	6	690
1343.	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
1344.	Jf Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9	1430
1345.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
1346.	Penyusun Rencana Mutasi	7	890
1347.	Pengelola Kepegawaian	6	690
1348.	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
1349.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Kesejahteraan, dan Pembinaan	11	2045
1350.	Jf Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	9	1430
1351.	Analisis Kompetensi	7	890
1352.	Analisis Diklat	7	890
1353.	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat	7	890
1354.	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan non Aparatur	7	890
1355.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	690
1356.	Jf Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9	1430
1357.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
1358.	Pengelola Disiplin Pegawai	6	690
1359.	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	690
1360.	Pengelola Kepegawaian	6	690
1361.	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
1362.	Jf Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9	1430
1363.	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
1364.	Pengelola Kepegawaian	6	690
1365.	Pengolah Data	6	690
1366.	Pengelola Data	6	690

XXIII.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
1367.	Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah	14	3030
1368.	Sekretaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah	12	2140
1369.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1370.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
1371.	Pengolah Data	6	690
1372.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian	9	1430
1373.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1374.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
1375.	Pengelola Surat	6	690
1376.	Pengelola Kepegawaian	6	690
1377.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
1378.	Pengolah Data Laporan Keuangan	7	890
1379.	Penata Laporan Keuangan	7	890
1380.	Verifikator Keuangan	6	690
1381.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	11	2045
1382.	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	9	1430
1383.	Pemeriksa Transaksi Keuangan	7	890
1384.	Pengelola Keuangan	6	690
1385.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
1386.	Kepala Sub Bidang Akuntansi	9	1430
1387.	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	7	890
1388.	Pengelola Akuntansi	6	690
1389.	Penata Keuangan	7	890
1390.	Jf Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1430
1391.	Penyusun Laporan Keuangan	7	890
1392.	Penata Laporan Keuangan	7	890
1393.	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	6	690
1394.	Kepala Bidang Anggaran	11	2045
1395.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	9	1430
1396.	Pemeriksa Anggaran	7	890
1397.	Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	7	890
1398.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	9	1430
1399.	Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	7	890
1400.	Pemeriksa Anggaran	7	890
1401.	Jf Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1430
1402.	Pemeriksa Anggaran	7	890
1403.	Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	7	890

1404.	Kepala Bidang Aset	11	2045
1405.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset	9	1430
1406.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890
1407.	Pengelola Data	6	690
1408.	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset	9	1430
1409.	Pemeriksa Pertanahan	7	890
1410.	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	690
1411.	Penata Kendaraan Dinas	7	890
1412.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1413.	Jf Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1430
1414.	Pengolah Data	6	690
1415.	Penyusun Laporan Keuangan	7	890
XXIV.	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
1416.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	14	3030
1417.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	12	2140
1418.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1419.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
1420.	Pengelola Program dan Laporan	6	690
1421.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian	9	1430
1422.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1423.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
1424.	Pengelola Surat	6	690
1425.	Pengelola Kepegawaian	6	690
1426.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
1427.	Pengolah Data Laporan Keuangan	7	890
1428.	Penata Laporan Keuangan	7	890
1429.	Verifikator Keuangan	6	690
1430.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan	11	2045
1431.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran	9	1430
1432.	Pengelola Data dan Informasi Perpajakan	6	690
1433.	Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	690
1434.	Penyusun Rencana Kebijakan	7	890
1435.	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Informasi	9	1430
1436.	Pengelola Data dan Informasi Perpajakan	6	690
1437.	Verifikator pajak	6	690
1438.	Penyusun Bahan Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan	7	890

1439.	Jf Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1430
1440.	Pengelola Data dan Informasi Perpajakan	6	690
1441.	Pengelola Dokumentasi	6	690
1442.	Penyusun Rencana Kebijakan	7	890
1443.	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	690
1444.	Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan	11	2045
1445.	Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak	9	1430
1446.	Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	690
1447.	Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	6	690
1448.	Pengelola PBB P2 dan BPHTB	6	690
1449.	Analisis Pajak Daerah	7	890
1450.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Keberatan Pajak	9	1430
1451.	Pengolah Data	6	690
1452.	Penyusun Bahan Kebijakan	7	890
1453.	Jf Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1430
1454.	Analisis Penilaian	7	890
1455.	Pengelola PBB P2 dan BPHTB	6	690
1456.	Pengolah Data Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan	6	690
1457.	Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Pelaporan	11	2045
1458.	Kepala Sub Bidang Penagihan	9	1430
1459.	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	6	690
1460.	Penyusun Laporan Kebijakan	7	890
1461.	Pengolah Data Penagihan Pajak	6	690
1462.	Jf Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1430
1463.	Pengelola Pajak Daerah	6	690
1464.	Pengelola Pendapatan	6	690
1465.	Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	6	690
1466.	Penyusun Laporan Keuangan	7	890
1467.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan	9	1430
1468.	Pemeriksa Transaksi Keuangan	7	890
1469.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690
1470.	Pengolah Data	6	690
XXV.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1471.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	2315
1472.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	1430

1473.	Penata Laporan Keuangan	7	890
1474.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
1475.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
1476.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1477.	Pranata Kearsipan	6	690
1478.	Pengelola Kepegawaian	6	690
1479.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9	1430
1480.	Analisis Mitigasi Bencana	7	890
1481.	Penyuluh Bencana	7	890
1482.	Pengelola Data Pencegahan dan Monitoring	6	690
1483.	Pranata Bencana	6	690
1484.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	9	1430
1485.	Analisis Bencana	7	890
1486.	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7	890
1487.	Penyusun Program Perencanaan Operasi	7	890
1488.	Pemelihara Peralatan	5	490
1489.	Pengelola Logistik	6	690
1490.	Pranata Bencana	6	690
1491.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	690
1492.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	9	1430
1493.	Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan	7	890
1494.	Analisis Bencana	7	890
1495.	Pengelola Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Bencana	6	690
XXVI.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1496.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	2865
1497.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	2115
1498.	Jf Perencana Ahli Muda	9	1430
1499.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
1500.	Pengelola Program dan Laporan	6	690
1501.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian	9	1430
1502.	Penata Laporan Keuangan	7	890
1503.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
1504.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
1505.	Verifikator Keuangan	6	690
1506.	Pengolah Data Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
1507.	Pengelola Surat	6	690
1508.	Pengelola Kepegawaian	6	690
1509.	Pengadministrasi Perijinan	5	490
1510.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1511.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	11	2045
1512.	Jf Analisis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
1513.	Penyusun Laporan Kebijakan	7	890

1514.	Pengelola Program Kegiatan	6	690
1515.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690
1516.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
1517.	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	7	890
1518.	Pengolah Data Intelijen	6	690
1519.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
1520.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690
1521.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	11	2045
1522.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
1523.	Penyusun Laporan Kebijakan	7	890
1524.	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	6	690
1525.	Pengelola Program Dan Kegiatan	6	690
1526.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690
1527.	Jf Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1430
1528.	Penyusun Laporan Kebijakan	7	890
1529.	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	6	690
1530.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
1531.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690
XXVII.	KECAMATAN		
1532.	Camat	12	2315
1533.	Sekretaris Camat	11	2090
1534.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	9	1455
1535.	Penyusun Program Anggaran dan pelaporan	7	890
1536.	Pengelola Program dan Laporan	6	690
1537.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian	9	1455
1538.	Penata Laporan Keuangan	7	890
1539.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
1540.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	690
1541.	Pengelola Surat	6	690
1542.	Pengelola Kepegawaian	6	690
1543.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
1544.	Pengelola Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6	690
1545.	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1455
1546.	Penyusun Laporan Kebijakan	7	890
1547.	Pengolah Data Pelayanan	6	690
1548.	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	690
1549.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	6	690
1550.	Kepala Seksi Pembangunan	9	1455
1551.	Penyusun Laporan Kebijakan	7	890

1552.	Pengelola Pembinaan Pembangunan	6	690
1553.	Pengelola Pengendalian, Monitoring Evaluasi Pembangunan	6	690
1554.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	1455
1555.	Penyusun Laporan Kebijakan	7	890
1556.	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690
1557.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	690
1558.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1455
1559.	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	7	890
1560.	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	690
1561.	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690
1562.	Pengelola Monitoring, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	6	690
1563.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	9	1455
1564.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690
1565.	Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat	7	890
1566.	Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	6	690
XXVIII.	KELURAHAN		
1567.	Lurah	9	1540
1568.	Sekretaris Lurah	8	1320
1569.	Penata Laporan Keuangan	7	890
1570.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	690
1571.	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690
1572.	Pengolah Data	6	690
1573.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban	8	1295
1574.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	690
1575.	Pengolah Data Pelayanan	6	690
1576.	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	690
1577.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	8	1295
1578.	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690
1579.	Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	6	690
1580.	Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	8	1295
1581.	Pengelola Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan	6	690
1582.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690

B. NOMENKLATUR JABATAN FUNSIONAL, KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

NO	NOMENKLATUR JABATAN	BOBOT JABATAN	
		KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
I	SEKRETARIAT DAERAH		
	Bagian Hukum		
1.	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	9	1355
2.	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8	1280
	Bagian Organisasi		
3.	JF Analis Kepegawaian Ahli Pertama	8	1280
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		
4.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
5.	JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	8	1270
6.	JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	10	1695
II.	INSPEKTORAT		
7.	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama	8	1280
8.	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda	9	1355
9.	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya	11	1930
10.	JF Auditor Ahli Muda	9	1355
11.	JF Auditor Penyelia	8	1230
12.	JF Auditor Ahli Pertama	8	1280
13.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280
14.	JF Auditor Mahir	7	1005
15.	JF Arsiparis Muda	9	1355
III.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		
16.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
IV.	DINAS PARIWISATA		
17.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
18.	JF Pamong Budaya Ahli Muda	9	1355
19.	JF Pamong Budaya Ahli Pertama	8	1280
V.	DINAS PERHUBUNGAN		
20.	JF Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	6	770
21.	JF Penguji Kendaraan Bermotor Mahir	7	1035
22.	JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	1260

VI.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
23.	JF Medik Veteriner Ahli Muda	9	1355
24.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
25.	JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	8	1310
26.	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	1260
27.	JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9	1385
28.	JF Penyuluh Pertanian Ahli Madya	11	2030
VII.	DINAS SOSIAL		
29.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
VIII.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
30.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
IX.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
31.	JF Penera Terampil	6	740
X.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
32.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
33.	JF Pranata Komputer Terampil	6	740
34.	JF Perencana Ahli Muda	9	1355
35.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	1310
36.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	1385
37.	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	1280
38.	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	1355
XI.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
39.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
XII.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
40.	JF Teknik Pengairan Ahli Pertama	8	1325
XIII.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
41.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280
42.	JF Pranata Komputer Terampil	6	740
XIV.	DINAS PENDIDIKAN		
43.	JF Pengawas Sekolah Ahli Madya	11	1960
44.	JF Pengawas Sekolah Ahli Muda	9	1385
45.	JF Pranata Komputer Terampil	6	740
46.	JF Analis Kepegawaian Ahli Muda	9	1355
47.	JF Penilik Ahli Madya	11	1930
48.	JF Pengawas Sekolah Ahli Utama	13	2585
49.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
50.	JF Analis Kepegawaian Ahli Pertama	8	1280

XV.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
51.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
52.	JF Arsiparis Terampil	6	740
53.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
54.	JF Pustakawan Ahli Muda	9	1355
55.	JF Pustakawan Terampil	6	740
56.	JF Pustakawan Ahli Madya	11	1930
57.	JF Pustakawan Ahli Pertama	8	1280
XVI.	DINAS KESEHATAN		
58.	JF Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8	1280
59.	JF Analis Kepegawaian Ahli Pertama	8	1280
60.	JF Apoteker Ahli Pertama	8	1295
61.	JF Asisten Apoteker Mahir	7	1020
62.	JF Asisten Apoteker Terampil	6	755
63.	JF Bidan Ahli Muda	9	1355
64.	JF Bidan Mahir	7	1005
65.	JF Bidan Terampil	6	740
66.	JF Bidan Penyelia	8	1230
67.	JF Bidan Ahli Pertama	8	1280
68.	JF Dokter Gigi Ahli Madya	12	2225
69.	JF Dokter Gigi Ahli Muda	10	1670
70.	JF Dokter Gigi Ahli Pertama	9	1370
71.	JF Dokter Ahli Madya	12	2225
72.	JF Dokter Ahli Muda	10	1720
73.	JF Dokter Ahli Pertama	9	1570
74.	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	8	1280
75.	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	1555
76.	JF Nutrisionis Ahli Muda	9	1555
77.	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1005
78.	JF Nutrisionis Penyelia	8	1230
79.	JF Nutrisionis Ahli Pertama	8	1280
80.	JF Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	9	1355
81.	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8	1280
82.	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1035
83.	JF Perawat Gigi Pelaksana/Terampil	6	770
84.	JF Perawat Gigi Penyelia	8	1260
85.	JF Perawat Ahli Madya	11	1960
86.	JF Perawat Ahli Muda	9	1385
87.	JF Perawat Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1035
88.	JF Perawat Pelaksana/Terampil	6	770
89.	JF Perawat Penyelia	8	1260
90.	JF Perawat Ahli Pertama	8	1310
91.	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1035
92.	JF Pranata Lab. Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1005

93.	JF Pranata Lab. Kesehatan Pelaksana/Terampil	6	740
94.	JF Pranata Lab. Kesehatan Penyelia	8	1230
95.	JF Sanitarian Ahli Muda	9	1370
96.	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1020
97.	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1035
98.	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana/Terampil	6	770
XVII.	DINAS PARIWISATA		
99.	JF Pamong Budaya Ahli Muda	9	1355
100.	JF Pamong Budaya Ahli Pertama	8	1280
XVIII.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
101.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	1280
102.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	3530
103.	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	1280
104.	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	3530
XIX.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
105.	JF Pranata Komputer Terampil	6	740
106.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
107.	JF Analis Kepegawaian Ahli Pertama	8	1280
XX.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
108.	JF Pranata Komputer Terampil	6	740
109.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280
XXI.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
110.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
111.	JF Pranata Komputer Terampil	6	740
112.	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	1295
113.	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1490

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO